

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja manajemen TI yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI masih rendah. Kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan menunjukkan bahwa manajemen TI kurang mampu merespon kebutuhan ketatalaksanaan sejalan dengan aturan yang berlaku. Kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif pelanggan menunjukkan bahwa manajemen TI kurang mampu menciptakan kemampuan TI, dan merespon kebutuhan bisnis dalam menyelaraskan dengan strategi organisasi. Kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif proses bisnis internal menunjukkan bahwa manajemen TI kurang mampu merespon kebutuhan ketatalaksanaan sejalan dengan aturan yang berlaku, memastikan TI mematuhi hukum dan regulasi, dan merespon kebutuhan ketatalaksanaan sejalan dengan aturan yang berlaku. Kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bahwa manajemen TI cukup mampu menciptakan kemampuan TI, dan menghimpun dan merawat skill sumberdaya TI.
2. Upaya strategis yang harus dilakukan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan pencapaian kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya (anggaran, pegawai, sarana) untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja manajemen TI di Departemen Hukum dan HAM RI adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
2. Sekretariat Jenderal perlu segera membuat Rencana Strategis TI (*IT Strategic Plan*) atau Rencana Induk TI (*IT Master Plan*) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif.
3. Sekretariat Jenderal perlu melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi.
4. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menghasilkan model pengembangan organisasi yang tepat bagi Sekretariat Jenderal agar dapat mengadaptasi perubahan dan perkembangan di bidang TI.

